



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



## **MODUL PARADIPLOMASI I**

# ***PERAN INTERNASIONAL PEMERINTAHAN DAERAH: TATA KELOLA, NEGOSIASI, DAN DIPLOMASI***

Disusun sebagai luaran dari Hibah Kedaireka 2023

**BAPPENAS - BINA NUSANTARA - DIKTI  
DESEMBER 2023**

## TIM PENYUSUN

### Penulis:

- ❖ Dr. Roseno Aji Affandi
- ❖ Miranda Tahalelel Ph.D
- ❖ Dr. Lili Yulyadi Arnakim .IRK., B.HSc., M.HSc.
- ❖ Moch Faisal Karim Ph.D
- ❖ Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama Ph.D
- ❖ Agustin Arry Yanna
- ❖ Yulia Agnis Sutarno
- ❖ Rahmat Hidayat

### Kontributor:

- ❖ Amelia Ari Putri
- ❖ Nur Komariah
- ❖ Adrian
- ❖ Benedictus N Davin
- ❖ Delviana Pramata
- ❖ Ichelle Aprilia
- ❖ Putrinda Tawainella
- ❖ Salsa Nabila Putri
- ❖ M. Reza Saputra

Disusun oleh BINUS dan BAPPENAS melalui pendanaan dari Kedaireka RISTEK DIKTI

## DAFTAR ISI

Abbreviation .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Pendahuluan .....	1
Objektif .....	3
Sesi Pelatihan .....	4
Tema Sub Modul .....	4
Framework dan tools yang digunakan .....	4
Cara Penyampaian (Delivery) .....	4
Rujukan Utama .....	5
Matrix Kurikulum Modul .....	6
SUB MODUL:	
a) SUB MODUL 1: Diplomasi dan Paradiplomasi .....	7
b) SUB MODUL 2: Aktor-aktor dalam melakukan paradiplomasi .....	15
c) SUB MODUL 3: Model-Model Paradiplomasi di Indonesia .....	19
d) SUB MODUL 4: Tata kelola pemerintahan dalam membuat kerjasama internasional .....	35
e) SUB MODUL 5: Tata cara negosiasi dalam perundingan internasional	41
Referensi .....	53

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1.</b> Matrix Kurikulum Modul.....	6
<b>Gambar 3.1.</b> Pengembangan GPN di sebuah Teritori Sumber Global Production Networks: Theorizing Economic Development in an Interconnected World by Coe, N. M., & Yeung, (2015) .....	22
<b>Gambar 3.2.</b> Proses dan goals Bargaining and cooperations, sumber: Global Production Networks: Theorizing Economic Development in an Interconnected World by Coe, N. M., & Yeung, (2015) .....	23
<b>Gambar 3.3.</b> Model Paradiplomasi DKI Jakarta .....	31
<b>Gambar 3.3.</b> Model Paradiplomasi Bali .....	32
<b>Gambar 3.3.</b> Model Paradiplomasi Bintang .....	34
<b>Gambar 4.1:</b> Contoh Siklus Pengembangan dan Management Proyek sumber: : World Bank, 2023 ( <a href="https://shorturl.at/ltD23">https://shorturl.at/ltD23</a> ).....	39

## ABBREVIATION

AFTA	: ASEAN-China Free Trade Agreement
CEFTA	: Central European Trade Agreement
FGD	: Focused Group Discussion
GCC	: Global Commodity Chain
GPN	: Global Production Network
IMF	: International Monetary Fund
LN	: Luar Negeri
OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
Pemda	: Pemerintahan Daerah
Pemprov	: Pemerintahan Provinsi
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threat
WTO	: World Trade Organization

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan draft modul paradiplomasi kedua: Meningkatkan Peran Internasional Pemda (pemerintahan Daerah). Modul pertama ini adalah hasil penelitian yang dibiayai oleh proyek Kedaireka Dikti bekerjasama dengan Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, modul ini juga sebagai langkah menindaklanjuti *policy recommendation* yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh staf pengajar dan civitas akademika (dosen) dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (BINUS).

Kami melakukan penelitian mendalam tentang peran Pemda dan proses internasionalisasi, yang kami sebut sebagai "model paradiplomasi", dan inovasi yang kami tawarkan adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau modal insan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan daerah di tingkat internasional dengan menjalankan kerjasama dengan pemerintahan daerah di negara lain seperti kerjasama Sister city. Jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara bekerja sama dengan Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas mengharapkan adanya program yang bisa meningkatkan peran pemda dalam kerjasama internasional. Diharapkan pemerintah daerah, khususnya bagian kerja sama internasional dan Bappeda, akan terlibat secara aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari tugas dan fungsi lembaga. Salah satu *follow up* ini adalah melaksanakan pelatihan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan paradiplomasi yang diharapkan bisa dieksekusi di tingkat pemerintahan daerah di provinsi wilayah Indonesia. Tujuan dari modul ini adalah





untuk berbagi pengalaman dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kerja sama internasional, terutama dalam bidang investasi dan perdagangan internasional dengan dengan organisasi internasional atau perusahaan multinasional. Selain itu, Modul pelatihan ini juga juga akan mengidentifikasi potensi, tantangan tatakelola, negosiasi dan diplomasi internasional. Modul hasil dari beberapa kegiatan seperti Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan bersama sama dengan Bappenas di Batam, Bali dan di Aceh.

## PENDAHULUAN

Di era desentralisasi, peran internasional pemerintah daerah (pemda) menjadi penting untuk memajukan daya saing di daerah melalui upaya memperluas peluang investasi, mengembangkan pasar internasional, serta turut aktif dalam jejaring internasional. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Luar Negeri No 3/2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemda. Nilai tambah dari kerjasama internasional bagi pemerintah daerah adalah memperkuat kebijakan publik yang lebih efisien dan pengembangan program-program yang lebih inovatif. Hal ini dapat dicapai dengan memobilisasi sumber daya teknis, keuangan dan politik, berbagi pengetahuan yang diperoleh dari kota lain, dan memperkuat kemampuan teknis dan politik pegawai negeri melalui berbagi pengalaman dengan aktor eksternal, termasuk aktor internasional yang beroperasi di Indonesia.

Dengan menyadari masih terbatas model, aturan serta, SOP dan instrumen untuk meningkatkan investasi asing dan perdagangan internasional di daerah yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Selain itu, tidak ada alat ukur terstandar untuk melakukan evaluasi dan monitoring terkait peran internasional pemda. Pemerintah Pusat hanya memiliki instrumen dalam mengukur tingkat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan inovasi-inovasi di level domestik melalui penghargaan pembangunan daerah (PPD) yang dilakukan tiap tahun. Maka kami merasa dengan menyediakan modul ini, kami bisa meningkatkan kemampuan Pemda dalam meningkatkan investasi asing dan mengembangkan perdagangan internasional untuk produk daerah. Semoga dengan adanya modul ini bisa membuat semua pemerintah daerah mampu mengembangkan fungsi dan peran internasional untuk mengembangkan potensi daerahnya.



Dengan rangkaian FGD dan Workshop yang telah diselenggarakan bersama-sama antara Bappenas dan Universitas Bina Nusantara dengan dukungan Program Kedaireka DIKTI, telah menjadi sumber utama untuk pengembangan modul paradiplomasi kedua untuk pemda di seluruh Indonesia. Kegiatan ini sudah direncanakan untuk membuat model pengembangan kerjasama internasional bagi daerah serta instrumen penilaian akan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Model kerjasama ini menekankan kepada strategi paradiplomasi yang sudah dikembangkan sebelumnya dan telah diterapkan di dalam skala yang terbatas sebelumnya. Model prototype dan konsep paradiplomasi/peran internasional daerah yang pernah disusun oleh BINUS, diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan kebijakan terkait peran internasional pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Model ini dikembangkan selama kurang lebih empat tahun dan prototipe-nya sudah diujicobakan secara terbatas dalam pengembangan peran internasional pemda untuk memajukan internasionalisasi sektor pariwisata. Model paradiplomasi ini adalah *poliheuristic* model yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dimensi, aktor, metode dalam proses pelaksanaan peran internasional tersebut. Model ini menitikberatkan kepada penguatan interaksi informalitas sebagai modalitas bagi pemerintah daerah melakukan kerjasama internasional. Model ini akan kami kembangkan sebagai alat, tidak hanya untuk mengukur kelemahan dan kekuatan setiap masing-masing pemda dalam melakukan kerjasama internasional namun juga untuk pembuatan strategi peningkatan peran internasional pemda.

Inovasi yang kami tawarkan adalah bagian dari riset panjang kami tentang peran pemda dan proses internasionalisasi, yang kreasi reka yang kami sebut “model paradiplomasi. Pelaksanaan pelatihan terkait paradiplomasi bagi pemerintah daerah provinsi seluruh Indonesia adalah untuk berbagi praktik baik

pemerintah daerah dalam pengembangan kerjasama internasional baik secara umum, dalam sektor investasi unggulan seperti pariwisata dan perdagangan, serta yang mempunyai bentuk kerjasama dengan lembaga internasional atau perusahaan multinasional yang beroperasi di daerahnya. Pemilihan peserta mengacu pada kemungkinan atau perencanaan serta potensi daerah terkait dari salah satu komponen dari kerjasama internasional. Adapun modul kedua ini terdiri dari 5 sub modul yang memberikan pelatihan fokus kepada berikut ini. Investasi dan Perdagangan internasional; Identifikasi kekuatan dan daya Tarik Daerah; Identifikasi potensial penanam modal, Negosiasi business internasional; Rencana dan monitoring investasi dan perdagangan internasional

### **Objektif**

Objektif dari modul ini terdiri beberapa tujuan, yakni:

1. Untuk menjelaskan kepada peserta tentang konsep diplomasi dan paradiplomasi yang akan dilakukan oleh para peserta dalam mengadakan kerjasama internasional di daerahnya.
2. Untuk memberikan kemampuan kepada para peserta untuk menjadi aktor/ pelaksana kerjasama dan perundingan internasional untuk mewakili daerahnya dan melaksanakan kegiatan paradiplomasi.
3. Memahami dan mampu menerapkan model- model paradiplomasi dalam kegiatan kerjasama dengan rekan sejawat dari negara.
4. Memberikan wawasan dan kemampuan kepada peserta dalam melaksanakan tata kelola yang baik dalam berbagai model paradiplomasi sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya.
5. Mampu melakukan negosiasi dengan rekan sejawat dari pemerintahan daerah negara lain yang menjadi mitra dalam kerjasama sister-city.

## Sesi Pelatihan

Setiap sub-modul akan disampaikan dan didiskusikan dengan peserta selama 90 menit. Keseluruhan durasi pelatihan untuk modul ini adalah 450 menit (7 jam 30 menit atau *full day*).

## Tema Sub Modul

Tema utama yang diangkat dalam sub-modul adalah:

- Diplomasi dan Paradiplomasi
- Aktor-aktor dalam melakukan paradiplomasi
- Model-Model Paradiplomasi
- Tata kelola pemerintahan dalam membuat kerjasama internasional
- Tata cara negosiasi dalam perundingan internasional

## Framework dan tools yang digunakan

Adapun framework dan tools yang digunakan melaksanakan pelatihan ini adalah buku dan artikel yang menjelaskan tentang paradiplomasi seperti yang dijelaskan oleh Alexander Kuznetsov (2015) dalam bukunya yang berjudul "*Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*" dan Rodrigo Tavares (2016) dalam tulisannya yang berjudul "*Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*".

## Cara Penyampaian (Delivery)

Cara penyampaian atau delivery system yang akan dipakai dalam menyampaikan materi ini adalah melalui berbagai cara seperti ceramah, diskusi, presentasi, brainstorming dan tanya jawab yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta dan sekaligus melihat respon partisipan.

### **Rujukan Utama**

1. Alexander Kuznetsov (2015), *“Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs”* (EU and China: Routledge)
2. Rodrigo Tavares(2016). *“Paradiplomacy: Cities and States as Global Players”* (US & China: Oxford University Press).

**Gambar 1.1 Matrix Kurikulum Modul**

**Modul I**  
**Pemberdayaan PEMDA dalam Paradiplomasi**

Modul	# Session (90 minutes)	Syllabus/ Learning Objective	Sub Modul	Tools/ Framework Used	Delivery
Paradiplomasi: Meningkatkan Peran Internasional PEMDA dengan meningkatkan kapasitas tatakelola	5	<p>Mampu memahami Konsep diplomasi dan paradiplomasi</p> <p>Mampu mengidentifikasi model- model paradiplomasi dalam kegiatan kerjasama</p> <p>Mampu berperan sebagai actor / pelaksana kerjasama Dalam kegiatan paradiplomasi.</p> <p>Mampu menerapkan tata kelola yang baik dalam kegiatan paradiplomasi</p> <p>Mampu melakukan negosiasi dalam kerjasama sister-city.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Diplomasi dan Paradiplomasi;</li> <li>2. Model paradiplomasi dan praktiknya di sistercity</li> <li>3. Aktor - aktor dan Perannya dalam melakukan paradiplomasi;</li> <li>4. Tata kelola pemerintahan dalam membuat kerjasama internasional,</li> <li>5. Tata cara negosiasi dalam perundingan internasional.</li> </ol>	<p>Alexander Kuznetsov (2015), "Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs" (EU and China: Routledge)</p> <p>Rodrigo Tavares(2016). "Paradiplomacy: Cities and States as Global Players" (US &amp; China: Oxford University Press).</p>	<p>Lecture</p> <p>Exercise</p> <p>Games</p> <p>Discussion</p>

## **SUB Modul 1: Pengertian Diplomasi dan Paradiplomasi**

**Deskripsi:** Sub-modul ini membahas pengertian diplomasi dan paradiplomasi, serta mengeksplorasi secara komprehensif kompleksitas konsep dan proses diplomasi dan paradiplomasi yang sedang berkembang. Peserta diajak untuk berdiskusi sambil mempelajari prinsip-prinsip dasar, praktik, dan evolusi sejarah diplomasi sebagai landasan hubungan internasional. Selain itu, sub-modul ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang paradiplomasi, menyoroti semakin pentingnya paradiplomasi di dunia yang mengalami proses globalisasi.

**Tujuan:** Peserta memahami konsep Diplomasi dan paradiplomasi

**Waktu:** 90 menit

**Media/alat bantu:** Materi PPT, Flip Chart, Kertas plano

**Metode:** Diskusi, Pemberian materi

### **Proses:**

1. Fasilitator meminta peserta menuliskan pemahaman mereka mengenai diplomasi dan contoh-contoh dari bentuk diplomasi yang mereka ketahui pada kertas plano.
2. Fasilitator me-review dan mengkategorikan definisi diplomasi dan paradiplomasi yang dituliskan oleh peserta
3. Fasilitator memasukkan hasil diskusi tentang definisi diplomasi dan paradiplomasi dalam matrix.
4. Fasilitator memberikan materi lebih lanjut terkait definisi dan kerangka diplomasi
5. Fasilitator membuka diskusi lebih lanjut dengan membandingkan jawaban peserta sebelumnya dengan materi yang diberikan
6. Fasilitator menutup sesi dengan kesimpulan sementara.

## **Materi**

Diplomasi didefinisikan sebagai aktivitas politik yang dapat menjadi sumber kekuatan atau kekuasaan (Berridge, 2022). Menurut Oxford English Dictionary, diplomasi adalah praktik penanganan dan pengaturan hubungan internasional melalui negosiasi, dan melibatkan duta besar dan utusan dalam pengelolaan hubungan tersebut (Cooper et al., 2013). The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy menjelaskan diplomasi sebagai praktik pengelolaan hubungan antar negara berdaulat dengan menggunakan pejabat yang bekerja baik di dalam negeri maupun internasional (Berridge & Lloyd, 2012). Para pejabat ini dapat merupakan anggota tetap dinas korps diplomatik suatu negara ataupun diplomat sementara. Diplomasi dapat melibatkan penempatan delegasi ke organisasi-organisasi internasional (Berridge & Lloyd, 2012). Diplomasi tidak hanya mencakup apa yang dilakukan oleh diplomat profesional namun diplomasi juga melibatkan upaya pejabat pemerintah lainnya dan individu swasta yang dipandu oleh pejabat tersebut. Tidak hanya melalui misi resident tradisional, diplomasi dapat dilakukan melalui jalur alternatif lain (Berridge, 2022).

Selama lima abad terakhir, aspek mendasar dari diplomasi adalah pengiriman misi diplomatik ke luar negeri, dan praktik ini pun masih diterima secara luas. Negara membutuhkan perwakilan yang dapat mengkomunikasikan pesan karena negara merupakan entitas yang bersifat nasional dan tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara layaknya suatu individu. Secara prinsip, komunikasi satu sama lain secara jarak jauh dapat dicapai melalui peralatan elektronik. Namun, muncul kekhawatiran praktikal yang signifikan akan penggunaan metode ini bagi komunikasi antarnegara (Berridge & Lloyd, 2012). Oleh karena itu, diplomasi berfungsi sebagai metode utama di mana negara-negara terlibat dalam komunikasi, memfasilitasi pembentukan hubungan di antara mereka. Diplomasi adalah institusi terpenting dalam masyarakat bernegara dan mencerminkan



sekaligus memperkuat relasi kekuatan antar negara yang juga merupakan unsur yang penting bersamaan dengan diplomasi. Dengan melakukan diplomasi, negara bertujuan untuk mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri mereka tanpa harus melibatkan penggunaan kekerasan, propaganda, ataupun hukum (Berridge, 2022). Sebaliknya, diplomasi dapat mencakup berbagai tindakan, seperti mengumpulkan informasi, memberikan penjelasan tentang tujuan yang dimiliki, serta menciptakan niat atau perbuatan baik.

Istilah ‘diplomasi’ sendiri dapat dikategorikan sebagai relatif baru. Istilah ini pertama kali diciptakan oleh Edmund Burke pada tahun 1796 untuk merujuk pada sistem ini (Berridge & Lloyd, 2012). Sebelum aktivitas-aktivitas tersebut dikenal sebagai diplomasi, mereka biasanya disebut sebagai negosiasi (Berridge, 2022). Asal muasal diplomasi kemungkinan besar dapat ditelusuri kembali ke interaksi antara ‘Raja-Raja Besar’ di Timur Jauh sepanjang milenium kedua atau bahkan akhir milenium keempat SM (Cooper et al., 2013). Terdapat beberapa ciri-ciri utama diplomasi pada periode tersebut yaitu komunikasi bergantung dengan kurir dan karavan pedagang, kekebalan diplomatik bergantung pada praktik keramahtamahan terhadap orang luar, dan kepatuhan yang ketat terhadap perjanjian karena takut akan pembalasan dari Tuhan. Diplomasi pada masa ini bersifat terbatas dan kurang maju biarpun terlihat sesuai atau cocok dengan era tersebut.

Mayoritas negara mempunyai kementerian khusus yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan manajemen mereka, bersama dengan layanan diplomatik, yang disebut sebagai kementerian luar negeri. Diplomat dan profesinya sendiri telah ada sejak dahulu kala. Sejak zaman dahulu, entitas politik yang berdaulat telah mengirimkan utusan resmi ke yurisdiksi politik asing sebagai perwakilan. Hal ini dilakukan oleh penguasa-penguasa di Yunani, Persia, India, dan Cina dalam

kegiatan seperti bertukar pesan dan hadiah, menegosiasikan perjanjian dan aliansi, menandatangani perjanjian damai, dan terkadang menengahi perselisihan antara negara tetangga.

Dibandingkan dengan diplomasi terdahulu, diplomasi sekarang telah mengalami berbagai perubahan. Aktor-aktor yang terlibat dalam diplomasi telah berkembang mencakup berbagai tipe termasuk negara atau pemerintah, perusahaan sektor swasta nasional, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah (LSM), dan organisasi regional dan antar pemerintah (IGO). Tidak hanya itu, bidang dan luas pokok bahasan atau isinya meluas ke berbagai sektor dalam kebijakan publik dan kegiatan pemerintah yang melebihi apa biasanya yang menjadi fokus konvensional pada kebijakan luar negeri yang 'bermasalah tinggi,' Akibat dari globalisasi, keterlibatan dan aktivitas diplomasi juga terjadi di berbagai tingkat yaitu lokal, nasional, bilateral, regional, dan global. Perubahan-perubahan lainnya pun ada pada kerangka hubungan internasional dan mekanisme diplomatik serta modalitas, klasifikasi, dan metodologi diplomasi. Diplomasi dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Terdapat berbagai alat dan instrumen yang dapat digunakan dalam diplomasi baik itu *soft power*, ekonomi, budaya, dan lain-lain.

### **Kerangka dan Cakupan Paradiplomasi**

Dalam beberapa dekade terakhir, muncul dimensi baru dalam diplomasi yang dikenal sebagai paradiplomasi. Paradiplomasi merujuk pada keterlibatan aktor subnasional dalam hubungan atau aktivitas internasional. Faktor-faktor seperti globalisasi, regionalisasi, serta meningkatnya aktivitas perusahaan multinasional dan transnasional telah menjadi pemicu utama bagi fenomena paradiplomasi (Tavares, 2016; Liu & Song, 2020). Dengan pertumbuhan ekonomi global, kemajuan teknologi transportasi, dan percepatan komunikasi, batasan

antara urusan dalam negeri dan luar negeri menjadi lebih pudar (Tavares, 2016). Akibatnya, peran dan tanggung jawab pemerintah sub nasional dan negara mengalami pergeseran signifikan. Dalam ranah hubungan internasional, peran "negara bangsa" mengalami penurunan sementara kehadiran aktor subnasional menjadi semakin penting (Liu & Song, 2020). Mereka terlibat aktif dalam aktivitas transnasional dan semakin independen dalam tindakan mereka, terkadang terpisah dari arahan pemerintah nasional (Liu & Song, 2020). Wilayah subnasional kini berinteraksi secara luas dengan negara lain, bisnis, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah internasional, organisasi internasional, gerakan sosial, dan serikat buruh. Dinamika interaksi ini, seperti yang diuraikan oleh Michael Keating, seringkali kompleks, tidak terstruktur, dan tersebar (Keating, 1999).

Melalui paradiplomasi, pemerintah subnasional memiliki potensi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat struktur sosial, dan mempromosikan warisan budayanya. Perkembangan serta kesejahteraan komunitas lokal kini tidak hanya bergantung pada kebijakan nasional, tetapi juga pada kebijakan lokal (Schiavon, 2019). Keterlibatan internasional menjadi jalan bagi pemerintah subnasional dalam meningkatkan taraf hidup di daerahnya. Paradiplomasi tidak hanya mampu menarik investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment* - FDI), namun juga memperluas pasar untuk produk-produk lokal, meningkatkan volume ekspor, serta membuka pintu kerjasama desentralisasi internasional yang lebih luas (McMillan, 2012; Grau Vidiella, 2013, sebagaimana dikutip dalam Schiavon, 2019). Alasan yang mendorong pemerintah subnasional untuk menjalankan paradiplomasi meliputi upaya mempromosikan perdagangan, menarik investasi asing, dan membangun citra serta hubungan antar-masyarakat. Dalam konteks globalisasi, kesempatan berlimpah tercipta melalui pergerakan lintas batas individu, barang, dan layanan. Oleh karena itu, untuk memajukan wilayahnya, pemerintah subnasional harus aktif memanfaatkan

peluang yang ada melalui paradiplomasi. Tidak terlibat dalam arena global dapat mengakibatkan ketinggalan, menjadikan wilayah tersebut hanya sebagai konsumen pasif dalam kerangka kapitalisme atau perdagangan global (Mukti, 2013).

Berikut merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap muncul dan berkembangnya paradiplomasi, adalah:

- **Globalisasi:**  
Keterhubungan dunia telah memberdayakan entitas subnasional untuk menjalin hubungan langsung dengan komunitas internasional (Tavares, 2016). Pertukaran ekonomi, budaya, dan sosial tidak lagi terbatas pada batas negara, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk menjalin hubungan internasional.
- **Desentralisasi:**  
Banyak negara telah menerapkan desentralisasi, memberikan berbagai tingkat otonomi kepada entitas subnasional (Pietrasiak et al., 2018). Otonomi ini memungkinkan mereka untuk mengejar kepentingan dan kebijakan mereka sendiri, termasuk terlibat dalam membangun hubungan internasional pada bidang tertentu seperti perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan isu lingkungan (Schiavon, 2019), sesuai kebutuhan dan kepentingan daerahnya.

Paradiplomasi dapat diwujudkan dalam berbagai cara:

- **Kerja Sama Ekonomi:**  
Entitas subnasional dapat terlibat dalam misi perdagangan, forum investasi, atau membuat perjanjian perdagangan dengan mitra asing untuk

menarik bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja secara lokal (Pietrasiak et al., 2018; Tavares, 2016).

- **Pertukaran Budaya dan Pendidikan:**  
Kota atau wilayah dapat memulai pertukaran budaya, kemitraan pendidikan, atau kampanye pariwisata untuk mempromosikan warisan budaya mereka, menarik pengunjung, dan meningkatkan visibilitas global mereka (Schiavon, 2019).
- **Inisiatif Iklim dan Lingkungan:**  
Pemerintah daerah sering berkolaborasi secara internasional untuk mengatasi tantangan lingkungan, berbagi praktik terbaik, dan mencari dukungan untuk proyek pembangunan berkelanjutan (Pietrasiak et al., 2018).
- **Kerja Sama Politik dan Sosial:**  
Beberapa pemerintah daerah berpartisipasi dalam jaringan dan forum internasional untuk mengadvokasi kepentingan politik, hak asasi manusia, atau kebijakan tertentu yang sama, yang melampaui batas-batas negara (Schiavon, 2019).

Namun, paradiplomasi bukannya tanpa tantangan. Paradiplomasi ini terkadang dapat menimbulkan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah karena adanya konflik kepentingan atau persepsi yang dapat melemahkan kedaulatan nasional. Selain itu, kesenjangan sumber daya dan kemampuan antar entitas subnasional dapat mempengaruhi efektivitas mereka dalam terlibat secara internasional. Paradiplomasi pun dikhawatirkan dapat memicu protodiplomasi. Terdapat kasus dimana pemerintah sub-nasional atau lokal melakukan hubungan

internasional dengan tujuan mendirikan negara merdeka atau biasa disebut dengan istilah protodiplomasi (Tavares, 2016). Protodiplomasi dianggap sebagai tindakan ilegal dan membahayakan keamanan negara (Tavares, 2016). Contoh tantangan lain dari paradiplomasi adalah bisa terjadinya konflik dengan kepentingan nasional. Kegiatan paradiplomasi terkadang berbenturan dengan tujuan kebijakan luar negeri pemerintah pusat, sehingga menyebabkan ketegangan atau konflik kepentingan antara kedua tingkat pemerintahan (Liu & Song, 2020).

## **SUB MODUL 2: Peran Aktor-aktor dalam paradiplomasi**

**Deskripsi:** Sub-modul ini mengidentifikasi peran aktor-aktor dalam proses kerjasama internasional dan paradiplomasi. Aktor yang diidentifikasi adalah aktor di dalam negeri, dan aktor luar negeri serta peran masing-masing aktor yang terlibat dalam proses kerjasama internasional tersebut.

**Tujuan:** Peserta memahami aktor-aktor dan peran serta kemampuan yang diperlukan dalam melakukan diplomasi dan paradiplomasi

**Waktu:** 90 menit

**Media/alat bantu:** Materi PPT, Flip Chart, Kertas plano

**Metode:** Diskusi, Pemberian Materi

### **Proses:**

1. Fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi aktor dalam diplomasi dan paradiplomasi. Selanjutnya fasilitator meminta peserta juga mengidentifikasi peran dan kemampuan yang dapat dijalankan oleh masing-masing aktor dalam proses diplomasi.
2. Fasilitator me-review jawaban yang ditulis peserta pada flipchart dan kertas plano.
3. Fasilitator memberikan materi pendalaman mengenai aktor dan peran serta hubungan antar aktor/stakeholder yang dapat dijalankan dan perlu diidentifikasi dalam proses diplomasi dan secara khususnya dalam paradiplomasi.
4. Fasilitator membuka diskusi lebih lanjut.



## **Materi**

Cakupan dalam kerjasama internasional, tidak bisa lepas dari proses diplomasi, hukum internasional, dan pemahaman mengenai tatanan dunia, serta beberapa isu terkait seperti gender, lingkungan, kerjasama perdagangan, kerjasama pembangunan, dan lain sebagainya. aktor dalam hubungan internasional adalah siapa saja yang memainkan peran dalam hubungan internasional yang mencakup negara dan bukan negara. Berikut identifikasi aktor yang terlibat dalam hubungan internasional yakni: (1) Negara – negara dalam interaksinya dengan aktor-aktor dalam hubungan internasional mengejar kepentingan nasionalnya; (2) Organisasi Internasional – suatu institusi yang didalamnya terdapat dua negara atau lebih dengan aktifitas yang melampaui batas-batas negara; (3) Perusahaan Multinasional – perusahaan yang memiliki beberapa cabang di berbagai negara dan memiliki kantor pusat di negara induk; (4) Teroris – istilah yang merujuk kepada tindakan atau ancaman penggunaan kekerasan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menciptakan ketakutan; dan (5) Individu (Wijatmadja, 2016 : 100-115).

Diplomasi selalu berhubungan dengan kegiatan politik luar negeri atau hubungan dengan negara lain termasuk hubungan ekonomi dan sosial-budaya. Hubungan tersebut umumnya diwakili oleh seorang diplomat yang tujuannya untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan negara, dengan ruang lingkup:

### (1) Kementerian Luar Negeri (KEMLU):

Umumnya Kementerian Luar Negeri berkedudukan di ibu kota negara pengirim. KEMLU bertanggungjawab atas politik luar negeri negara, hal ini dikarenakan berfungsi sebagai pihak yang mengatur politik luar negeri sebuah negara.

(2) Perwakilan Diplomatik:

Perwakilan diplomatik berkedudukan di dalam ibu kota negara lain. Fungsi dari perwakilan diplomatik tersebut adalah sebagai ‘penyambung lidah dan panca indera’ dari negara yang diwakilinya. Bentuk dari perwakilan diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI), Konsulat RI, Perutusan Tetap RI pada PBB, maupun Perwakilan RI tertentu yang bersifat sementara.

Selain aktor-aktor tradisional yang disebutkan diatas, terdapat aktor non-tradisional yang terlibat dalam proses diplomasi saat ini. Aktor-aktor tersebut adalah:

(1) Lembaga Pembangunan internasional

Lembaga Pembangunan Internasional atau yang sebelumnya sering disebut sebagai lembaga donor, mempunyai kapasitas untuk bergerak melewati batas negara melalui kerjasama pembangunan baik berupa pemberian hibah maupun pinjaman luar negeri. Proses pemberian dan dukungan terhadap isu pembangunan terhadap negara-negara yang membutuhkan, membuat lembaga pembangunan harus mempunyai kemampuan bernegosiasi dengan pihak negara maupun non-negara yang terlibat dalam kegiatannya yang dilaksanakannya.

(2) Perusahaan Multinasional.

Perusahaan multinasional saat ini merupakan aktor dalam diplomasi karena keterlibatan mereka dalam melakukan negosiasi dengan aktor negara diluar negara asalnya terutama untuk melakukan ekspansi bisnis dan usahanya.

(3) Lembaga Internasional Non-Pemerintah (NGO).

Sama dengan lembaga pembangunan internasional, lembaga internasional non-pemerintah juga bergerak diluar batas negara dan melakukan negosiasi dengan berbagai aktor untuk melaksanakan kegiatannya.

(4) Pemerintah Daerah

Dampak globalisasi membuat pemerintah daerah perlu berinteraksi dan bernegosiasi dengan aktor pemerintah negara lain dan aktor non negara. Oleh sebab itu, pemerintah daerah juga tidak lepas dari peran dan kemampuan berdiplomasi dalam menjalankan hubungan internasional dengan pihak-pihak yang terlibat di wilayah dan daerahnya.

Dalam melaksanakan diplomasi, terdapat dua cara yaitu menggunakan kekuatan lunak untuk berdiplomasi (*soft power diplomacy*), seperti diplomasi budaya, dan diplomasi dengan kekuatan keras (*hard power diplomacy*) seperti pengiriman tentara ke luar negeri. Dalam konteks paradiplomasi, kekuatan lunak berdiplomasi yang paling sering digunakan. *Soft power diplomacy* adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan melalui atraksi daripada paksaan atau pembayaran. Kekuatan lunak suatu negara bergantung pada sumber daya budaya, nilai-nilai, dan kebijakannya. Aktor yang melakukan diplomasi kebudayaan mencakup hampir semua dapat menjadi aktor dalam diplomasi yang satu ini, bukan hanya aktor negara tetapi juga aktor non negara, kelompok, individu bahkan seluruh warga negara dapat menjadi bagian dari aktor diplomasi budaya atau kebudayaan sehingga hubungan diplomasi budaya atau kebudayaan antar bangsa atau negara tidak hanya terjadi antara pemerintahannya saja.

### **SUB MODUL 3: Model-Model Paradiplomasi**

#### **Deskripsi:**

**Tujuan:** Peserta memahami model-model diplomasi dan keuntungan serta kelemahan masing-masing model.

**Waktu:** 90 menit

**Media/alat bantu:** Materi PPT, Flip Chart, Kertas plano

**Metode:** Pemberian Materi, Diskusi, Kerja Kelompok

#### **Proses:**

1. Fasilitator memberikan materi mengenai model-model diplomasi dan paradiplomasi, terutama yang dijalankan oleh lembaga internasional termasuk LSM Internasional, kerjasama antar pemerintah daerah, maupun kerjasama dengan investor asing.
2. Fasilitator meminta peserta mengidentifikasi dalam kelompok praktek yang sudah dijalankan oleh daerah, termasuk identifikasi apa saja keuntungan dan kelemahan atau isu yang muncul dari kerjasama internasional tersebut.
3. Peserta mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok, dan peserta lain menanggapi
4. Fasilitator menanggapi hasil diskusi dan memberikan masukan lebih lanjut.
5. Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi dan sesi.

#### **Materi**

Dalam membahas model-model paradiplomasi, ada beberapa teori dan konsep yang perlu dipahami yaitu globalisasi, *Global Production Network* (GPN), *bargaining and cooperation*, *multi-level governance*, dan paradiplomasi. Teori dan

konsep tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman akan bagaimana entitas subnasional memainkan peran yang semakin signifikan dalam diplomasi dan hubungan internasional.

### **Globalisasi**

Globalisasi sering dianggap oleh para ahli sebagai fenomena yang komprehensif termasuk berbagai dimensi. Menurut Waters (2003), globalisasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial di mana batasan yang dikenakan oleh geografi pada pengaturan sosial dan budaya berkurang, dan orang menjadi lebih menyadari efek penurunan ini. Menurut Waters, ada tiga jenis globalisasi yang berbeda: ekonomi, politik, dan budaya. Jenis globalisasi ini memiliki pengaruh pada skala global terutama melalui penggunaan simbol. Semakin banyak simbol yang terkait dengan mereka, semakin mudah mereka menyebar ke seluruh dunia.

Menurut Cheng (2003), globalisasi adalah proses transfer, adaptasi, dan pengembangan nilai-nilai, pengetahuan, teknologi, dan norma-norma perilaku antara negara dan masyarakat di berbagai wilayah dunia. Cheng juga mengklaim bahwa ia dibedakan oleh ekspansi konektivitas global, pertukaran global, dan interaksi di bidang teknologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan, serta kolaborasi dan kompetisi *internasional*. Menurut Bottery (2003), globalisasi ekonomi dapat digambarkan sebagai munculnya tiga elemen yang berbeda. Salah satu fitur kunci adalah meningkatnya mobilitas global modal, termasuk masuk dan keluar, yang difasilitasi oleh informasi dan teknologi.

Globalisasi merupakan fenomena yang ditandai dengan peningkatan keterkaitan dan saling ketergantungan antar negara di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Fenomena ini membawa konsekuensi logis bagi pemerintah daerah, yaitu perlunya meningkatkan kerjasama dengan pihak

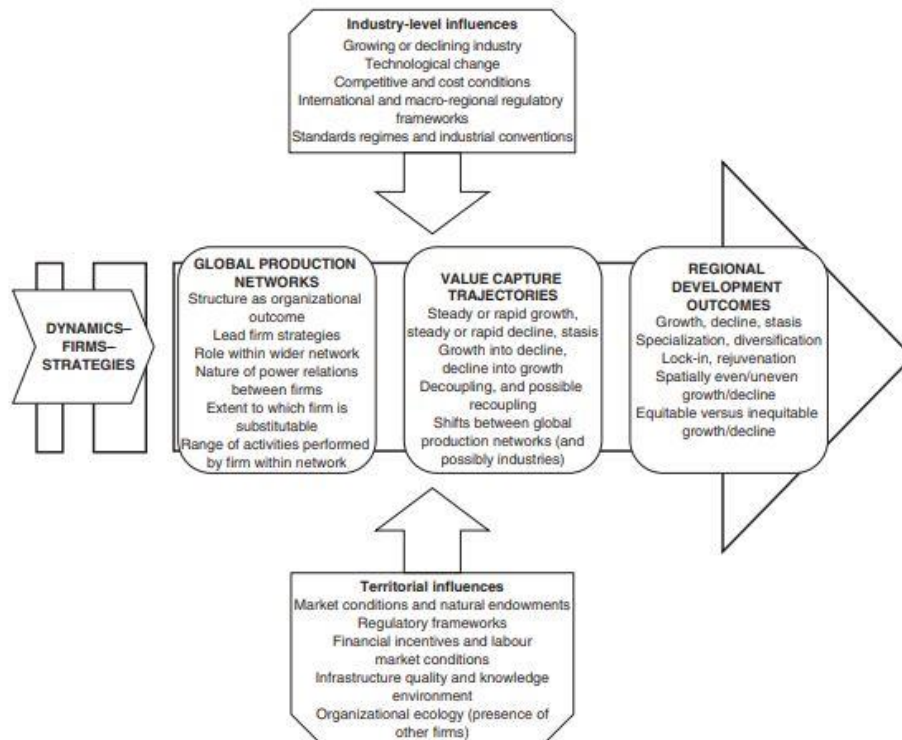
internasional. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak internasional dapat diartikan sebagai hubungan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, organisasi internasional, atau lembaga non-pemerintah di luar negeri. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, budaya, dan lingkungan hidup. Adapun kerjasama internasional yang dituangkan dalam paradiplomasi memiliki *beberapa* manfaat seperti meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat hubungan internasional. Dengan demikian, modul ini menampilkan contoh-contoh paradiplomasi yang melambangkan dampak globalisasi melalui kerjasama internasional.

### ***Global Production Network (GPN)***

*Global Production Network (GPN)* adalah struktur organisasi yang terdiri dari aktor ekonomi dan non-ekonomi yang saling terkait, diawasi oleh perusahaan terkemuka global, dan terlibat dalam produksi barang atau jasa di beberapa wilayah geografis untuk pasar global (Coe & Yeung, 2015). Aktor penting dan prasyarat utama pada GPN adalah perusahaan. GPN juga terlibat dengan aktor-aktor pada lokasi-lokasi tertentu yang memiliki hubungan ekonomi dengan aktor pada GPN tersebut.

Konsep GPN lebih dari sekedar pengertian sederhana mengenai tugas perdagangan atau outsourcing dengan berfokus pada aspek koordinasi dan kolaborasi bisnis yang lebih rumit di antara para pelaku yang terlibat dalam jaringan ini (Coe & Yeung, 2015).

**Gambar 3.1** Pengembangan GPN di sebuah Teritori



Sumber: *Global Production Networks: Theorizing Economic Development in an Interconnected World* by Coe, N. M., & Yeung, (2015).

Konsep ini menggarisbawahi teknik dan strategi spesifik yang digunakan oleh berbagai entitas untuk membangun, mengelola, dan mempertahankan jaringan produksi global yang kompleks ini. Selain itu, gagasan GPN tidak hanya mempertimbangkan tindakan bisnis individu tetapi juga mencakup respons strategis dari aktor korporat dan non korporat lain yang berpartisipasi dalam jaringan (Coe & Yeung, 2015). Perspektif yang lebih luas ini mengakui bahwa dalam GPN, berbagai aktor - seperti pemasok, produsen, penyedia layanan, badan pengatur, dan bahkan organisasi sosial atau politik - bereaksi dan beradaptasi secara strategis terhadap perubahan atau tantangan dalam jaringan.

GPN menjadi terkenal sebagai metode utama untuk mengatasi tantangan dinamis dalam hal efisiensi biaya, kecepatan, dan fleksibilitas, yang sangat penting

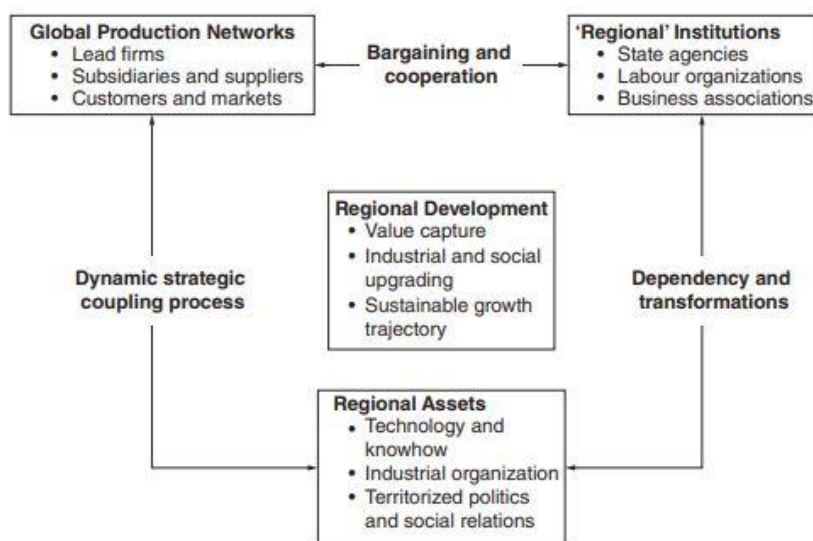


untuk mencapai daya saing dalam perekonomian global saat ini (Coe & Yeung, 2015). Jaringan ini dianggap sebagai solusi komprehensif terhadap tuntutan kompleks kesuksesan bisnis modern. Mereka mewakili penggabungan strategi spasial, organisasi, dan teknologi untuk menjawab tantangan-tantangan ini (Coe & Yeung, 2015).

Di GPN, kendali dan koordinasi tidak dilakukan secara dominan melalui kepemilikan langsung atas seluruh tahap produksi. Sebaliknya, perusahaan pemimpin mengelola dan mengatur jaringan dengan memanfaatkan beragam strategi. Strategi ini mencakup berbagai bentuk kolaborasi seperti subkontrak, aliansi, kemitraan, dan hubungan non-ekuitas (Coe & Yeung, 2015). Melalui pengaturan yang rumit dan fleksibel ini, perusahaan-perusahaan utama melakukan kontrol atas proses produksi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengatur jaringan pemasok, produsen, dan penyedia layanan di berbagai lokasi geografis yang berbeda (Coe & Yeung, 2015).

### ***Bargaining and Cooperation***

**Gambar 3.2:** Proses dan goals *Bargaining and cooperations*



Sumber: *Global Production Networks: Theorizing Economic Development in an Interconnected World* by Coe, N. M., & Yeung, (2015).

Menurut Coe (2004), *Bargaining and Cooperation* berpendapat bahwa dalam memahami masalah ketimpangan ekonomi memerlukan fokus pada sub-nasional. Dalam kerangka tata kelola regional yang berkembang, konsep pembangunan daerah dipahami sebagai hasil dinamis dari interaksi yang mempromosikan keunggulan regional dan meningkatkan integrasi regional ke dalam GPN memerlukan partisipasi lembaga regional multi-skala. Lembaga-lembaga ini tidak hanya dari entitas nasional tetapi juga mencakup lembaga nasional/supranasional dan lembaga ekstra-lokal. *Bargaining and Cooperation* dalam GPN menekankan pada negosiasi dan kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat dalam produksi global. Wilayah subnasional berperan penting dalam perkembangan ekonomi dikarenakan perusahaan dan bisnis terletak pada wilayah tertentu. Terlebih, setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing baik secara institusi, politik, ekonomi, dan sosial sehingga perusahaan multinasional harus menciptakan strategi yang tepat dalam berinteraksi atau ekspansi ke wilayah tersebut (Coe & Yeung, 2015). Perkembangan wilayah dipengaruhi oleh kerja sama dan interaksi di antara perusahaan multinasional dan wilayah subnasional.

*Bargaining and cooperation* terjadi dari interaksi perusahaan multinasional dan wilayah subnasional yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing. Perusahaan multinasional memiliki kepentingan untuk meningkatkan daya saing mereka sedangkan wilayah subnasional bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Pemerintah subnasional akan menciptakan strategi pembangunan daerah dan berkolaborasi secara strategis untuk menghasilkan aset bersama guna membangun kemampuan mereka. Sementara itu, perusahaan multinasional akan melaksanakan *strategic coupling* ketika kebutuhan strategis mereka selaras dengan aset-aset di wilayah tersebut. Hanya ketika aset-aset regional selaras kebutuhan strategis perusahaan multinasional

barulah aset-aset regional tersebut dapat memberikan manfaat bagi wilayah dan mendukung pembangunan regional (Coe & Yeung, 2015).. Oleh karena itu, *strategic coupling* memerlukan partisipasi aktif dari perusahaan multinasional dan wilayah subnasional. *Strategic coupling* dapat dipengaruhi oleh berbagai aktor yang beroperasi pada skala spasial yang berbeda termasuk aktor lokal, nasional, dan internasional (Coe & Yeung, 2015).. Karakteristik lain dari *strategic coupling* meliputi ketergantungan pada konteks, bersifat sementara, tidak otomatis, dan tidak selalu berhasil.

*Bargaining and Cooperation* menciptakan *regional development* dengan tiga faktor utama yaitu: 1). *Value Capture*, 2). *Industrial and Social Upgrading* 3). *Sustainable Growth Trajectory*. Tiga faktor ini menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam pembangunan daerah yang multi level, multi aktor, dan multi-sektor. Dalam paradiplomasi sendiri kerjasama internasional diperuntukan untuk menarik investasi lokal maupun asing yang berfungsi untuk mendongkrak pergerakan ekonomi dan pertumbuhan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat. Sehingga penting untuk memastikan bahwa Regional development dalam proses bargaining and cooperation harus menciptakan sebuah pusat industri yang berbasis dengan *regional assets* seperti 1). Teknologi dan pengetahuan, 2). Organisasi industri, 3). *Terrorized politics* dan hubungan sosial.

### ***Multi-Level Governance***

Marks et al. (1996) mengakui pentingnya negara pusat sebagai pemain kunci, sementara juga mengakui keberadaan aktor lain. Konsep tata kelola multi-level mengakui kepraktisan perumusan kebijakan, di mana pengambilan keputusan didistribusikan di antara berbagai lembaga, entitas supranasional memiliki otoritas pengambilan keputusan mereka sendiri, dan lanskap politik dicirikan oleh interkoneksi daripada hierarki yang kaku. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa interaksi terjadi di semua tingkatan, dan tidak hanya melalui pemerintahan pusat (Marks et al., 1996).

Konsep *multi-level governance* melibatkan keterlibatan berbagai aktor dalam berbagai kebijakan yang saling berhubungan. Prosesnya mungkin memerlukan entitas subnasional, seperti pemerintah sub nasional dan kelompok kepentingan, yang terlibat dalam negosiasi langsung dengan aktor supranasional (Marks et al., 1996). Piattoni (2009) memberikan definisi *multi-level governance* sebagai konstruksi teoritis yang mencakup mobilisasi politik, perumusan kebijakan, dan pengaturan politik yang dapat dianalisis dari perspektif politik, kebijakan, atau politik. Konsep *multi-level governance* melibatkan pertimbangan interaksi antara suatu wilayah dan entitas lain dalam suatu negara, termasuk pemerintah nasional atau federal dan unit sub-regional, baik dalam posisi yang lebih tinggi maupun lebih rendah (Piattoni, 2009)

Terlepas dari manfaat potensialnya, kerangka tata kelola *multi-level* menghadapi kritik karena keterbatasan implementasi praktisnya. Palmer (2008) berpendapat bahwa konsep tata kelola *multi-level* sering dilihat dari perspektif top-down, dengan pemerintah sub-negara dianggap sebagai penerima manfaat pasif. Hal ini disebabkan munculnya pemerintahan *multi-level*. Sudut pandang khusus ini lalai memperhitungkan dampak dari pemerintah daerah yang kuat dan potensi keuntungan dan kendala yang ditimbulkan oleh proses integrasi Eropa. Itu juga tidak menjelaskan mengapa aktor sub-negara dapat memilih untuk terlibat di tingkat pemerintahan atau mengapa mereka dapat dilucuti dari kekuasaan legislatif (Palmer, 2008). *Multi-level governance* dapat mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, dan pariwisata. Paradiplomacy dapat menjadi salah satu bentuk kerja sama tersebut, misalnya melalui kerjasama *sister city*.

## Paradiplomasi

Paradiplomasi didefinisikan sebagai keterlibatan pemerintah subnasional pada kegiatan atau hubungan internasional. Analisis konsep paradiplomasi dapat dilakukan melalui dimensi globalisasi dan dimensi ekonomi global.

### a. Paradiplomasi dan Dimensi Globalisasi

Paradiplomasi adalah konsekuensi dari globalisasi. Globalisasi telah mengubah perekonomian global secara mendasar dan memfasilitasi pergerakan modal, tenaga kerja, dan teknologi tanpa hambatan. Situasi tersebut menyebabkan entitas transnasional seperti WTO, NAFTA, dan perusahaan multinasional seperti Google dan Microsoft berada pada garis depan perekonomian global sedangkan perekonomian nasional menjadi lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Pergeseran dinamika kekuatan ekonomi global ini tidak hanya terjadi antara pemerintah nasional dan entitas supranasional namun juga antara pemerintah nasional dan wilayah konstituennya. Sebagai dampaknya, unit-unit sub nasional memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk secara efektif mengadvokasi kepentingan ekonomi mereka di panggung global, dan tidak bergantung pada otoritas pusat. Interaksi antara globalisasi dan paradiplomasi memiliki sifat dualistik yaitu globalisasi memungkinkan diplomasi konstituen, sementara paradiplomasi secara timbal balik mendorong globalisasi.

Hubungan di antara globalisasi dan paradiplomasi juga dapat dilihat dari segi budaya. Berdasarkan dari Michael Keating, budaya nasional dan peran negara dalam melestarikannya telah dilemahkan oleh teknologi komunikasi modern dan dominasi budaya global yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat. Globalisasi tidak hanya menyederhanakan standar ekonomi di seluruh dunia tetapi pada saat yang sama, juga

menghilangkan berbagai perbedaan budaya di antara masyarakat. Meskipun beberapa orang memandang erosi keunikan budaya ini sebagai hal yang menguntungkan, sebagian besar ahli menekankan dampak buruknya, dan menggarisbawahi pentingnya melestarikan keanekaragaman budaya demi kemajuan umat manusia dan mendorong pertumbuhan masyarakat global. Globalisasi mendukung wilayah subnasional dengan menciptakan peluang baru untuk menunjukkan keunikan mereka di dunia internasional.

b. Paradiplomasi dan Dimensi Ekonomi Global

Dalam ekonomi global, pemerintah subnasional menjadi lebih signifikan dalam dunia internasional. Hal ini tampak dari prestasi wilayah-wilayah subnasional, seperti California atau Texas di Amerika Serikat, yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat menyaingi negara-negara besar seperti Italia atau Australia. Dalam kajian tentang keterlibatan pemerintah daerah dalam perekonomian global, sebagian besar penelitian berkonsentrasi pada pengaruh wilayah subnasional terhadap rezim perdagangan internasional dan kebijakan perdagangan luar negeri pemerintah nasional. Praktik paradiplomasi pemerintah subnasional utamanya dipacu oleh tujuan ekonomi. Mereka menggunakan paradiplomasi untuk mempromosikan kepentingan finansial mereka secara global dan meningkatkan daya saing dalam negeri. Di tangan wilayah yang kaya, paradiplomasi menjadi alat tambahan untuk meningkatkan ekonomi dan akhirnya semakin memperkaya wilayah tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, paradiplomasi dapat memperdalam kesenjangan dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Untuk berperan lebih aktif di dunia internasional, pemerintah subnasional dapat melakukan kegiatan seperti memberikan bantuan teknis,

mendirikan kantor di luar negeri, berpartisipasi dalam pameran dagang, melakukan riset pasar, dan terlibat dalam bantuan keuangan.

Berikut 3 contoh praktek atau model paradiplomasi yaitu paradiplomasi Jakarta, paradiplomasi Bali, dan paradiplomasi Bintan.

### **Model Paradiplomasi Jakarta**

Pada model paradiplomasi Jakarta, pemerintah menentukan strategi pembangunan daerah dan melaksanakannya berbasis RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Setelah menetapkan strategi, visi, atau target pembangunan, pemerintah Jakarta mengumpulkan teori dan data-data yang berkaitan dengan kerja sama internasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan paradiplomasi yang didukung dengan teori-teori berupa teori dimensi globalisasi, dimensi ekonomi global, dan *multi-level governance*. Teori-teori tersebut membentuk model paradiplomasi Jakarta. Tujuan dari paradiplomasi Jakarta adalah untuk menjadikan Jakarta sebagai *global city* atau kota global. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut, paradiplomasi Jakarta berkaitan dengan isu-isu global dan partisipasi dalam organisasi atau kegiatan internasional. Jakarta yang memiliki hubungan dengan multi-aktor di ASEAN menekankan adanya *multi-governance*. Jakarta juga bergabung ke dalam UCLG (United Cities and Local Governments), C40 Cities, dan U20.

Paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta dibentuk dalam model pengembangan kerjasama internasional dan investasi asing. Kerjasama pemerintah provinsi Jakarta bertujuan untuk memastikan dan memantapkan bahwa Jakarta mampu menjadi kota global yang berdaya saing. Sehingga program-program kerjasama yang dikembangkan akan banyak mengusung kota berbasis

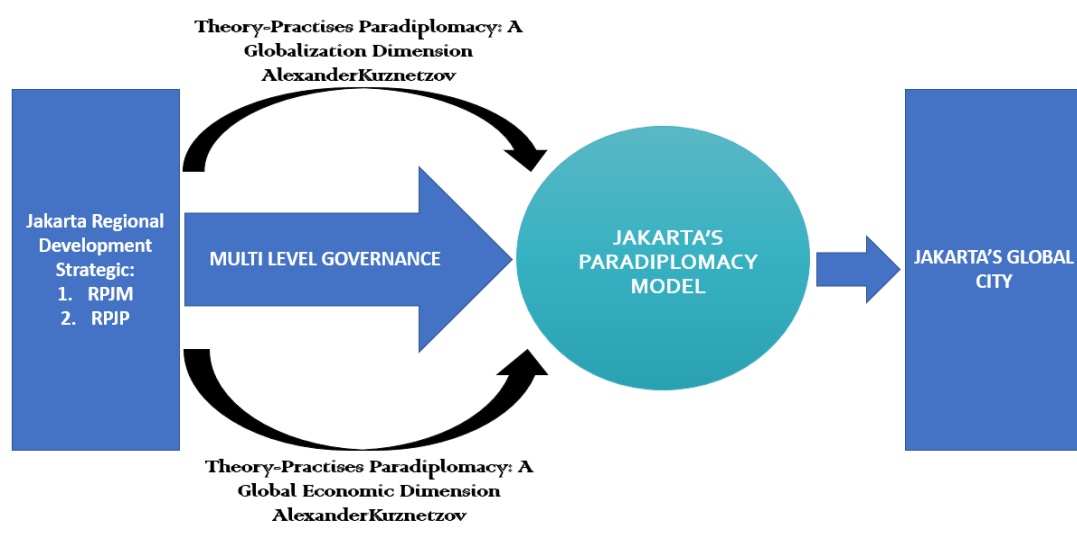


*sustainable*. *Sister city* merupakan salah satu contoh kerjasama yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Jakarta sejak lama sampai saat ini. DKI Jakarta saat ini telah melakukan kerjasama dengan 22 *sister city*. *Sister city* yang bekerjasama dengan Jakarta umumnya memiliki karakteristik yang sama seperti Jakarta secara jumlah penduduk, ekonomi, dan luas wilayah. Sebagai salah satu contoh yaitu kerjasama *sister city* dengan New South Wales, dimana pemerintah memberikan kuota beasiswa kepada masyarakat Jakarta untuk menempuh pendidikan tinggi di 11 Universitas Dunia di kota tersebut. Selain itu, Rotterdam juga merupakan salah satu *sister city* Jakarta yang memiliki program untuk membantu DKI Jakarta untuk bebas banjir. Program ini dinamakan Dutch Training and Exposure yaitu berupa pelatihan bagi 74 ASN DKI Jakarta selama 3-4 bulan untuk mempelajari isu pengolahan air. Dan banyak lagi contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Pemerintah provinsi Jakarta dalam kerjasama internasionalnya bersama dengan *sister city*.

Pemerintah Jakarta juga menunjukkan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga regional dan internasional lainnya seperti ASEAN Forum, UCLG, C40, dan U20. Keterlibatan Jakarta di forum dan organisasi tersebut menunjukkan bahwa Jakarta berkomitmen untuk mengatasi berbagai tantangan regional dan global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan kesenjangan pembangunan. Forum dan organisasi tersebut memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk bertukar informasi dan pengalaman dengan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, organisasi internasional, dan lembaga non-pemerintah. Jakarta dalam keanggotaannya di ASEAN Forum dapat berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain di ASEAN untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Melalui kerjasamanya dengan UCLG sendiri Jakarta mampu memperoleh dukungan dari pemerintah daerah lain di dunia untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perkotaan, seperti banjir,

kemacetan, dan polusi udara. Penyertaannya dalam C40 sendiri mampu membuat Jakarta bekerjasama dengan kota-kota besar di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan dalam keikutsertaan Jakarta dalam U20 sendiri Jakarta dapat berkontribusi dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi muda.

**Gambar 3.3.** Model Paradiplomasi DKI Jakarta

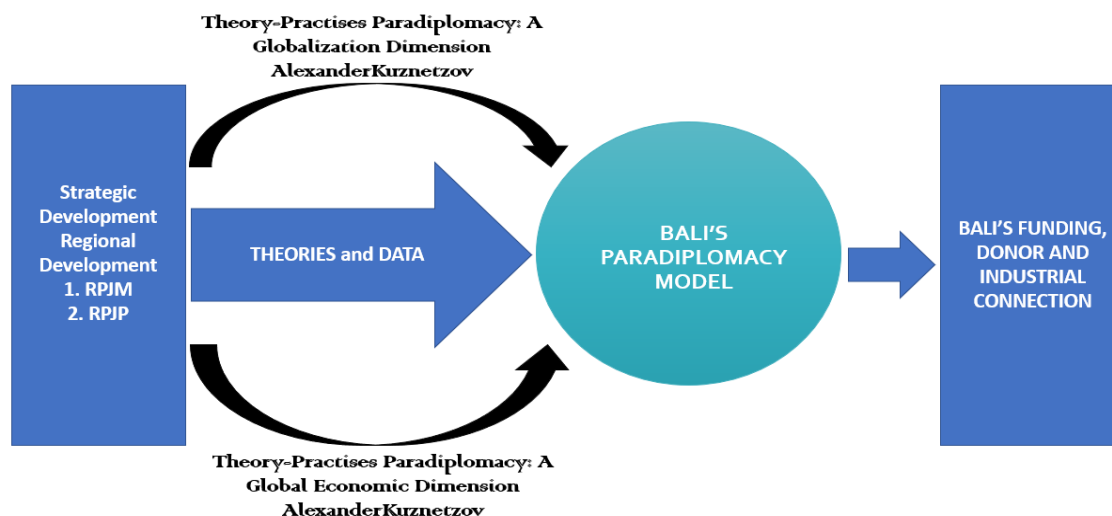


### Model Paradiplomasi Bali

Seperti hal nya yang dilakukan di Jakarta, model paradiplomasi Bali diawali oleh pemerintah dalam menentukan strategi pembangunan daerah dan mengimplementasikannya dalam basis RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Setelah menetapkan strategi, visi, misi, dan tujuan pembangunan. Kemudian pemerintah Bali mengumpulkan teori dan data-data yang berkaitan dengan kerjasama internasional. Teori yang mendukung pelaksanaan paradiplomasi Bali adalah teori globalisasi dan dimensi ekonomi global. Model paradiplomasi Bali bertujuan untuk mencari pembiayaan, donor, dan koneksi industri.

Mari kita ambil kerjasama Pemerintah Bali dengan Christian Dior Couture, S.A sebagai contoh. Christian Dior yang merupakan salah satu rumah mode mewah asal Prancis yang adalah salah satu fashion brand terbesar di dunia saat ini. Kerjasama pemerintah Provinsi Bali dengan Christian Dior, S.A merupakan salah satu upaya dalam mempromosikan ekspresi budaya tradisional khususnya pemanfaatan Tenun Endek Bali dalam produk Dior. Pada tahun 2021 Kain Endek menjadi salah satu busana yang masuk dalam koleksi Spring/Summer 2021. Dengan demikian, upaya tersebut tidak hanya mampu menjadi salah satu media promosi budaya tetapi juga sangat berdampak pada perekonomian khususnya pemberdayaan UMKM Bali yang memproduksi Tenun Endek. Kerjasama ini juga berupaya memberikan pelatihan di tempat pembuatan Dior kepada sumber daya manusia dan UMKM produsen Tenun Ikat Endek Bali selama 3 tahun. Adapun kerjasama terkait penelitian dan pengembangan Tenun ikat Endek Bali, dan di bidang-bidang lainnya yang menjadi kepentingan bersama sesuai kompetensi masing-masing pihak yang disepakati bersama.

**Gambar 3.4.** Model Paradiplomasi Bali



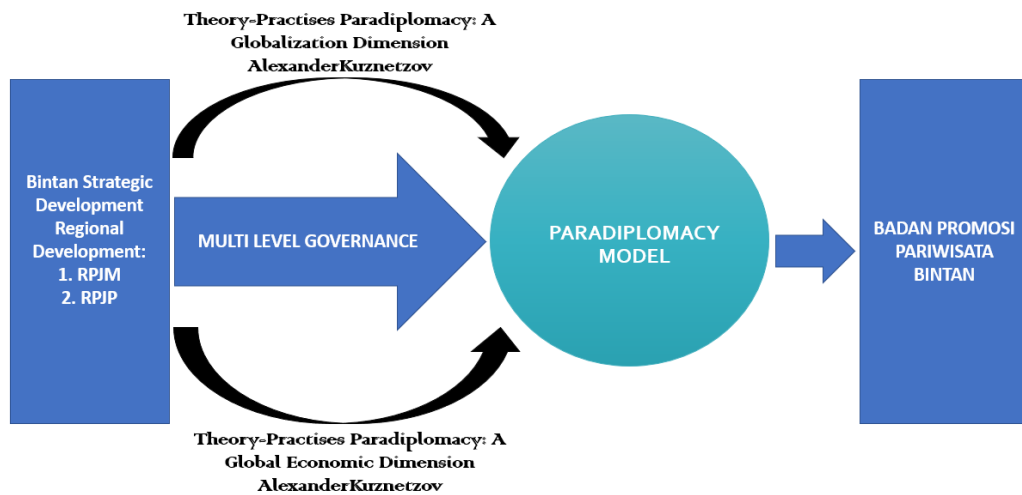
## **Model Paradiplomasi Bintan**

Pada model paradiplomasi Bintan, pemerintah menentukan strategi pembangunan daerah dan mengimplementasikannya dalam basis RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Pemerintah akan menetapkan strategi, visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah mereka. Kemudian sama halnya dengan Jakarta dan Bali, pemerintah Bintan mengumpulkan teori dan data-data yang dapat mendukung kerja sama internasional serta paradiplomasi Bintan. Teori dan data-data tersebut meliputi teori globalisasi, dimensi ekonomi global, dan *multi-level governance*. Dengan model paradiplomasi tersebut, pemerintah Bintan bertujuan untuk membentuk badan promosi pariwisata di Bintan.

Pemerintah Bintan bekerjasama dengan Bintan Resort Development Corporation milik Singapura untuk mengembangkan badan promosi pariwisata yang sekarang dikenal sebagai Bintan Resort Cakrawala (BRC). Pariwisata merupakan salah satu cara yang diusung pemerintah untuk meningkatkan integrasi regional dengan meningkatkan perjalanan intra-ASEAN. Pariwisata di Bintan sendiri mengadaptasi penerapan standar internasional di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah Bintan bekerjasama dengan perusahaan internasional yang adalah BRDC untuk mengembangkan program sertifikasi lokal dan mendirikan lembaga pendidikan pariwisata bagi masyarakat lokal. Sehingga dari adanya kerjasama ini, Bintan telah muncul sebagai referensi untuk mengevaluasi kinerja kebijakan pengembangan pariwisata, selain Bali. Bintan terletak di wilayah perbatasan kemitraan SIJORI Growth Triangle, yang mencakup Singapura, Johor (Malaysia), dan Kepulauan Riau. (Indonesia). Ini menunjukkan keberhasilan implementasi *multi-level governance* di Bintan, di mana pemerintah setempat telah secara efektif melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam

negosiasi langsung dengan aktor supranasional, yaitu pemerintah Singapura dan Malaysia. Kerjasama ini telah memungkinkan sub-region untuk menarik investasi regional dan internasional. Pemerintah, bersama dengan BRDC, juga terlibat dalam mendorong pertumbuhan pariwisata di Bintan.

**Gambar 3.5.** Model Paradiplomasi Bintan



## **SUB MODUL 4: Tata kelola dalam pelaksanaan kerjasama internasional**

**Deskripsi:** Sub-modul ini akan mendiskusikan tata kelola dan siklus proyek yang dijalankan oleh lembaga pembangunan internasional. Siklus proyek ini penting untuk dipahami untuk menentukan posisi pemerintah dalam proses negosiasi dan penentuan kegiatan. Sehingga pada saat implementasi kegiatan, pemerintah daerah dapat memahami apa saja intervensi dan kontribusi yang dapat dilakukan.

**Tujuan:** Peserta mekanisme tata Kelola yang biasa diimplementasikan oleh lembaga pembangunan internasional dalam mengembangkan kerjasama internasional.

**Waktu:** 90 menit

**Media/alat bantu:** Materi PPT, Flip Chart, Kertas plano

**Metode:** Pemberian materi, Diskusi, berbagi pengalaman dari daerah.

### **Proses:**

1. Fasilitator meminta daerah untuk membagikan pengalaman dan yang mempunyai praktik baik terkait pelaksanaan kerjasama internasional di daerahnya untuk membagikan pengalaman daerahnya.
2. Fasilitator memberikan materi terkait mekanisme kerjasama yang dijalankan antara pemerintah daerah dengan lembaga internasional dan investasi asing yang ada di Indonesia
3. Fasilitator membuka diskusi terkait mekanisme dan kendala yang sering terjadi di daerah dalam pengembangan tata Kelola kerjasama internasional.
4. Fasilitator membantu mengidentifikasi upaya tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tata kelola yang selama ini dilakukan daerah.
5. Fasilitator menutup diskusi dengan review dari hasil diskusi.

## **Materi**

Pelaksanaan kerjasama internasional di Indonesia tidak akan lepas dari peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, seperti peraturan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kerjasama internasional dengan pihak-pihak terkait. Namun dalam proses pelaksanaannya, lembaga internasional seperti lembaga kerjasama pembangunan internasional (lembaga donor) dan investor asing mengembangkan sistem dan mekanisme pengelolaan kegiatan yang paralel dengan peraturan pemerintah. Seringkali, hal ini tidak dipahami oleh penerima manfaat, sehingga pelaksanaan sering dianggap tidak sesuai ekspektasi dan harapan.

Pelaksanaan kegiatan atau proyek dari lembaga pembangunan internasional perlu dipahami sebelum proyek dilaksanakan di daerah. Dapat diidentifikasi bahwa masing-masing lembaga donor mempunyai sistem pengelolaan proyek terutama dalam mengimplementasikan kegiatannya. Pengembangan sistem ini biasanya mulai dilaksanakan sejak proses perencanaan proyek hingga penutupan proyek. Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam pengembangan sebuah proyek yang dimulai sejak proses identifikasi proyek hingga tahap evaluasi (Gambar 1).

### **Tahap 1: Tahap identifikasi kegiatan**

Dalam tahap ini, lembaga internasional mengidentifikasi kegiatan apa yang akan dikembangkan dan dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah Indonesia termasuk identifikasi daerah dimana kegiatan akan dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan ini diintegrasikan dalam sebuah proyek bersama yang akan dilaksanakan. Dalam identifikasi kegiatan dan proyek, juga dikembangkan model pengelolaan kegiatan/proyek termasuk pengembangan

dokumen kegiatan yang akan dinegosiasikan. Usulan kegiatan/proyek tidak akan lepas dari dokumen utama kesepakatan Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan lembaga donor, seperti dokumen *Country Programme* atau *Country Partnership Framework* serta prioritas pemerintah negara penerima, seperti dokumen RPJM, RPJP, RKP, atau RPJM Daerah.

#### Tahap 2: Tahap Persiapan

Pada tahap ini beberapa hal akan dilaksanakan untuk mengembangkan lebih lanjut usulan kegiatan dan proyek, yakni kajian kemampuan teknis, kajian pendanaan dan faktor ekonomi terkait, kapasitas institusi dan pengaturan institusi, pengelolaan keuangan dan pengadaan, kajian lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, dan hasil serta resiko dari proyek.

#### Tahap 3: Tahap *Appraisal* / Proses Penilaian

Tahap ini dokumen penilaian proyek secara lengkap mulai di draft dan disusun oleh lembaga donor dengan berkonsultasi dengan calon pelaksana proyek dari pihak pemerintah Indonesia. Dokumen proyek yang disusun termasuk semua usulan dan kegiatan kegiatan termasuk rencana dan kerangka waktu pelaksanaan. Dokumen penilaian proyek juga berisi mekanisme pengelolaan kegiatan seperti project management unit (PMU).

Selain itu, dalam tahap ini juga disusun perjanjian legal dari kerjasama, terutama jika kegiatan juga mencakup pinjaman pemerintah yang mengidentifikasi resiko dan mekanisme penyelesaian masalah jika terdapat isu yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan, baik secara isu terkait substansi kegiatan maupun yang terkait dengan penggunaan dana.



#### Tahap 4: Tahap Negosiasi dan Persetujuan Proyek/Kegiatan

Dalam tahap ini, proses negosiasi dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan lembaga donor, termasuk untuk mem finalisasi dokumen penilaian proyek, dokumen legal, dan MOU terkait yang diperlukan. Proses negosiasi penting bagi pemerintah untuk mengklasifikasikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan memang sesuai dengan kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang sejalan dengan target dan prioritas pembangunan pemerintah.

#### Tahap 5: Tahap Implementasi

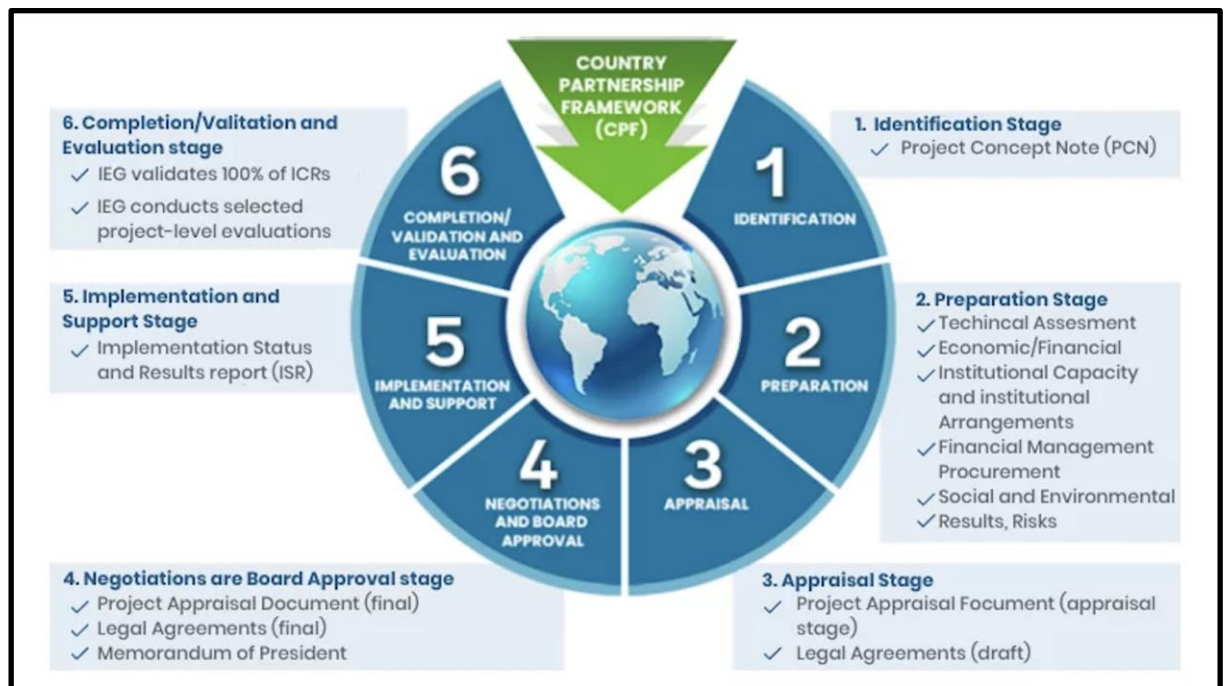
Pada tahap implementasi, semua aspek termasuk pengelola kegiatan, bentuk kegiatan, pendanaan, mekanisme pengadaan, dan hal terkait lainnya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Jika terjadi masalah, proses yang dijalankan harus sesuai dengan dokumen kesepakatan awal. Selain itu, jika ada usulan kegiatan baru, maka mekanisme pertemuan koordinasi dapat diusulkan. Dalam tahap ini proses monitoring kegiatan juga dilaksanakan baik monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan dan monitoring penggunaan dana kegiatan.

#### Tahap 6: Tahap Penyelesaian dan Evaluasi

Tahap penyelesaian kegiatan dan evaluasi merupakan tahap terakhir dalam sebuah siklus pelaksanaan proyek/kegiatan. Dalam tahap ini, masing-masing pihak dapat mereview pelaksanaan kegiatan, termasuk mengidentifikasi proses pembelajaran, praktik baik, tantangan dan hambatan dari pelaksanaan proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap ini juga dapat diidentifikasi mengenai usulan proyek/kegiatan baru sebagai kelanjutan dari proyek yang sudah berjalan,

terutama penguatan untuk aspek-aspek yang belum tercapai atau yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

**Gambar 4.1:** Contoh Siklus Pengembangan dan Management Proyek



Sumber: World Bank, 2023 (<https://shorturl.at/ltD23>)

Keterlibatan pemerintah penting dijalankan sejak proses perencanaan kegiatan, tahap 1. Hal ini untuk menghindari ketidakpahaman pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga tantangan dan hambatan atau isu yang muncul dapat diidentifikasi sejak awal pelaksanaan kegiatan, sehingga rencana pelaksanaan kegiatan juga dapat tercermin dan diintegrasikan dalam perencanaan daerah yang mendukung rencana prioritas pemerintah daerah.

Untuk investasi asing yang dilaksanakan di daerah terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan di luar mekanisme pengelolaan bantuan internasional

yang dilaksanakan oleh lembaga donor. Investor asing yang masuk ke daerah, terutama di sektor strategis seperti migas, perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Namun, implikasi dari investasi asing di daerah akan sangat berdampak pada masyarakat di daerah tersebut. Maka perlu diperhatikan beberapa aspek untuk memfasilitasi investasi asing di daerah, diantaranya adalah:

1. Pemerintah daerah perlu berkonsultasi dengan pemerintah pusat mengenai pelaksanaan dan cakupan investasi pusat yang dilaksanakan daerah.
2. Pemerintah daerah perlu mengembangkan pola kerjasama strategis yang sejalan dengan perencanaan dan rencana pembangunan daerah dengan investor asing yang ada di daerahnya, baik melalui pola kerjasama yang ada seperti CSR forum, maupun mengembangkan pola koordinasi lainnya sejalan dengan peraturan yang ada.
3. Pemerintah daerah juga perlu memikirkan pengelolaan tata kota sebagai implikasi dari masuknya investor asing di daerahnya.

Hal-hal tersebut merupakan beberapa aspek yang perlu diperhatikan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada aspek yang secara khusus juga perlu diperhatikan mengacu pada natur dan bentuk investasi asing yang masuk ke daerah. Proses pembelajaran dan pengalaman baik dari daerah terkait mekanisme pengelolaan investor asing di daerah, dapat menjadi *benchmark* (tolak ukur) yang baik bagi daerah untuk mengembangkan kerjasama lebih lanjut.

## **SUB MODUL 5: Tata cara negosiasi dalam perundingan internasional**

**Deskripsi:** Sub-modul ini akan mengidentifikasi pentingnya negosiasi dalam pengembangan peran internasional pemerintah daerah. Negosiasi merupakan proses komunikasi yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Dalam konteks pemerintah daerah, negosiasi dapat dilakukan untuk menjalin kerjasama internasional dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dari negara lain, organisasi internasional, dan perusahaan swasta. Untuk mencapai negosiasi yang efektif, pemerintah daerah perlu mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun mental.

**Tujuan:** Peserta memahami konsep dan model pengembangan investasi dan perdagangan internasional. Peserta juga akan mempelajari berbagai aspek penting dalam negosiasi, termasuk persiapan, pembukaan, penyampaian posisi, pembahasan, dan persetujuan. Peserta juga akan mempelajari beberapa tips untuk melakukan negosiasi yang efektif. Modul ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama internasional. Negosiasi merupakan keterampilan penting yang perlu dikuasai oleh para pejabat pemerintah daerah. Dengan menguasai keterampilan negosiasi, para pejabat pemerintah daerah dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan mitra internasionalnya.

**Waktu:** 90 menit

**Media/alat bantu:** Flip Chart, Kertas plano

**Metode:** Diskusi, Curah Pendapat

### Proses:

1. Peserta dibagi kedalam dua kelompok besar, kelompok Marvel dan Batman. Fasilitator membagikan lembar permainan peran tentang negosiasi. Mereka kemudian dimintakan untuk membaca lembar karakter dan tugas kelompok selama 15 menit.
2. Setelah selesai, kedua kelompok digabung. Peserta kemudian dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari dua atau empat orang (tergantung jumlah peserta). Dua atau empat orang tersebut harus berasal dari kelompok yang berbeda bermain peran, dalam bentuk bertemu, bersapa, dan bernegosiasi terkait isu yang sudah ditentukan sebelumnya (isu kerjasama pembangunan dengan lembaga internasional, isu perdagangan internasional, dan isu investasi asing).
3. Fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain:
  - a. Berapa banyak kelompok yang berhasil menandatangani kesepakatan?
  - b. Berapa yang tidak berhasil?
  - c. Mengapa berhasil? Mengapa tidak berhasil?
  - d. Bagaimana perasaan mereka selama proses negosiasi?
  - e. Hal-hal apa saja yang terjadi dan mengapa?
  - f. Apa yang bisa kita pelajari dari proses ini?
4. Peserta mempresentasikan hasil kerja dan diskusi dari masing-masing kelompok.
5. Fasilitator menjelaskan bahwa keberhasilan dan ketidakberhasilan proses negosiasi.
6. Fasilitator menutup sesi dengan melakukan review ulang yang bisa menjadi proses pembelajaran dari proses negosiasi.

## **Materi**

### **Pentingnya Negosiasi dalam Perundingan Internasional untuk Pengembangan Peran Internasional Pemerintah Daerah**

Negosiasi adalah interaksi sosial unik di mana negosiator memiliki kebutuhan atau keinginan yang saling melengkapi. Ho Won Jeong (2016) menyatakan bahwa negosiasi sangat penting dalam mengelola urusan manusia, terutama di ruang publik, baik domestik maupun internasional. Alsubaie (2019) juga menyatakan bahwa negosiasi merupakan salah satu instrumen penting dalam hubungan internasional. Negosiasi dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, termasuk dalam rangka pengembangan peran internasional pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam rangka mengembangkan peran internasionalnya, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk menjalin kerjasama internasional.

Kerjasama internasional dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berbagai macam pihak, termasuk pemerintah daerah dari negara lain, organisasi internasional, dan perusahaan swasta. Kerjasama internasional dapat memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah daerah, antara lain:

- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah
- Memperkuat posisi tawar-menawar pemerintah daerah
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Negosiasi merupakan hal yang penting dalam rangka mencapai tujuan kerjasama internasional. Negosiasi yang efektif dapat membantu pemerintah daerah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan mitra internasionalnya.

## **Langkah-langkah Tata Cara Melakukan Negosiasi dalam Perundingan Internasional**

Berikut adalah langkah-langkah tata cara melakukan negosiasi dalam perundingan internasional:

### **1. Persiapan**

Tahap persiapan merupakan tahap yang paling penting dalam negosiasi. Pada tahap ini, negosiator perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar dapat melakukan negosiasi dengan efektif. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam tahap ini antara lain:

- **Mempelajari latar belakang masalah**

Negosiasi biasanya dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu kesepakatan. Oleh karena itu, negosiator perlu memahami latar belakang masalah yang akan dinegosiasikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait, seperti perjanjian atau kesepakatan sebelumnya, peraturan perundang-undangan, dan penelitian yang relevan.

- **Memahami posisi masing-masing pihak**

Negosiasi melibatkan dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, negosiator perlu memahami posisi masing-masing pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari tujuan, kepentingan, dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

- Menentukan tujuan negosiasi

Tujuan negosiasi perlu ditentukan dengan jelas agar negosiasi dapat berjalan dengan efektif. Tujuan negosiasi dapat berupa pencapaian kesepakatan, penyelesaian masalah, atau peningkatan hubungan.

- Menyusun strategi negosiasi

Strategi negosiasi merupakan rencana yang akan digunakan dalam negosiasi. Strategi negosiasi perlu disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tujuan negosiasi, posisi masing-masing pihak, dan sumber daya yang dimiliki.

Dalam rangka pengembangan peran internasional pemerintah daerah, pemerintah daerah perlu memahami kepentingan nasional yang akan diperjuangkan dalam negosiasi. Pemerintah daerah juga perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dalam melakukan negosiasi internasional.

## **2. Pembukaan**

Pada tahap pembukaan, negosiator dari masing-masing pihak akan memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan negosiasi. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan dan kepercayaan antara kedua pihak. Pada tahap ini, negosiator juga perlu menetapkan aturan main negosiasi, seperti bahasa yang akan digunakan, batasan waktu, dan mekanisme pengambilan keputusan.



### **3. Penyampaian posisi**

Pada tahap ini, masing-masing pihak akan menyampaikan posisinya secara jelas dan rinci. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pihak lain tentang apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak.

### **4. Pembahasan**

Pada tahap ini, kedua pihak akan membahas berbagai hal terkait dengan masalah yang dinegosiasikan. Hal ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara kedua pihak. Pada tahap ini, negosiator perlu menggunakan berbagai teknik negosiasi, seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan, dan menawarkan solusi.

### **5. Persetujuan**

Pada tahap ini, kedua pihak akan berusaha mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, negosiasi dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Berikut adalah beberapa tips untuk melakukan negosiasi yang efektif dalam rundingan internasional:

- Siapkan diri dengan baik  
Negosiasi yang efektif membutuhkan persiapan yang matang. Negosiator perlu mempersiapkan diri dengan mempelajari latar belakang masalah, memahami posisi masing-masing pihak, menentukan tujuan negosiasi, dan menyusun strategi negosiasi.

- Kenali lawan bicara Anda  
Negosiasi yang efektif juga membutuhkan pemahaman terhadap lawan bicara. Negosiator perlu memahami tujuan, kepentingan, dan sumber daya yang dimiliki oleh lawan bicara.
- Bersikaplah sopan dan profesional  
Negosiasi merupakan proses komunikasi yang melibatkan dua pihak atau lebih. Oleh karena itu, negosiator perlu bersikap sopan dan profesional agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar.
- Fokus pada kepentingan bersama  
Negosiasi yang efektif berfokus pada kepentingan bersama, bukan pada kepentingan masing-masing pihak. Negosiator perlu berusaha untuk menemukan solusi yang dapat menguntungkan kedua pihak.
- Siap untuk berkompromi  
Kompromi merupakan bagian dari negosiasi. Negosiator perlu siap untuk berkompromi agar dapat mencapai kesepakatan.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan tata cara negosiasi dalam perundingan internasional agar dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan mitra internasionalnya.

## Praktek Negosiasi dalam Perundingan Internasional untuk Pemerintah Daerah

Berikut adalah beberapa contoh praktek negosiasi dalam perundingan internasional untuk pemerintah daerah:

### 1. Kerjasama sister city

*Sister city* atau kota kembar adalah sebuah hubungan kerjasama antara dua kota yang berada di dua negara yang berbeda. Hubungan kerjasama ini biasanya dijalin untuk meningkatkan hubungan antar dua negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, maupun sosial.

*Sister city* biasanya dijalin antara dua kota yang memiliki kesamaan atau kemiripan, seperti sejarah, budaya, atau tujuan pembangunan. Hubungan kerjasama ini dapat dijalin atas inisiatif dari pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, atau masyarakat.

#### Manfaat *sister city*

*Sister city* memiliki berbagai manfaat, antara lain:

- Meningkatkan hubungan antar dua negara  
*Sister city* dapat membantu meningkatkan hubungan antar dua negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, maupun sosial. Hubungan yang baik antara dua negara dapat memberikan manfaat bagi kedua negara, seperti peningkatan perdagangan, investasi, dan pariwisata.
- Meningkatkan pemahaman antar budaya  
*Sister city* dapat membantu meningkatkan pemahaman antar budaya antara masyarakat dari dua negara yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pertukaran pelajar, pertukaran budaya, dan kunjungan antar kota.

- Meningkatkan pembangunan berkelanjutan

*Sister city* dapat membantu meningkatkan pembangunan berkelanjutan di kedua kota. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kerja sama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Langkah-langkah menjalin *sister city*

Berikut adalah langkah-langkah menjalin *sister city*:

1. Penentuan mitra

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan mitra kota kembar. Mitra kota kembar dapat dipilih berdasarkan kesamaan atau kemiripan, seperti sejarah, budaya, atau tujuan pembangunan.

2. Pengiriman proposal

Setelah mitra kota kembar ditentukan, pemerintah daerah perlu mengirimkan proposal kerjasama *sister city* ke mitra kota kembar. Proposal kerja sama harus mencakup berbagai hal, seperti tujuan kerja sama, ruang lingkup kerja sama, manfaat kerja sama, dan mekanisme kerja sama.

3. Pembahasan proposal

Mitra kota kembar akan meninjau proposal kerja sama yang dikirimkan oleh pemerintah daerah. Jika proposal kerjasama disetujui, maka kedua pihak akan melanjutkan ke tahap pembahasan.

#### 4. Penandatanganan perjanjian

Setelah kedua pihak menyepakati kesepakatan kerja sama, maka akan dilakukan penandatanganan perjanjian *sister city*. Perjanjian *sister city* merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar hubungan kerjasama antara kedua kota.

#### 5. Pelaksanaan kerja sama

Setelah perjanjian *sister city* ditandatangani, maka kedua pihak akan mulai melaksanakan kerja sama yang telah disepakati. Kerja sama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, budaya, ekonomi, dan sosial.

#### Langkah-langkah Negosiasi *Sister City*

Negosiasi *sister city* biasanya dilakukan oleh beberapa perwakilan dari pemerintah daerah, baik dari pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah maupun pemerintah daerah yang menjadi mitra. Negosiasi ini biasanya mencakup berbagai hal, seperti:

- Tujuan kerjasama
- Ruang lingkup kerjasama
- Jadwal pelaksanaan kerjasama
- Dana yang dibutuhkan

Dalam negosiasi *sister city*, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut:

- Kompatibilitas antara kedua pemerintah daerah
- Kesesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat
- Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan

## 2. Kerjasama Government to Government (G2G)

Kerjasama G2G atau *Government to Government* adalah kerjasama antara dua pemerintah dari dua negara yang berbeda. Kerjasama ini biasanya dijalin untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan, seperti peningkatan perdagangan, investasi, pembangunan, dan keamanan.

Kerjasama G2G dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti:

- **Perdagangan**

Kerjasama G2G dalam bidang perdagangan dapat dilakukan untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara, seperti melalui negosiasi perdagangan, perjanjian perdagangan bebas, dan kerja sama promosi perdagangan.

- **Investasi**

Kerjasama G2G dalam bidang investasi dapat dilakukan untuk menarik investasi dari negara lain, seperti melalui perjanjian investasi, kerja sama promosi investasi, dan kerja sama pengembangan infrastruktur.

- **Pembangunan**

Kerjasama G2G dalam bidang pembangunan dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan di kedua negara, seperti melalui kerja sama pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

- Keamanan

Kerjasama G2G dalam bidang keamanan dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan di kedua negara, seperti melalui kerja sama anti-terorisme, anti-narkotika, dan anti-penyelundupan.

Kerjasama G2G memiliki berbagai manfaat, antara lain:

- Meningkatkan hubungan bilateral

Kerjasama G2G dapat membantu meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara. Hubungan yang baik antara dua negara dapat memberikan manfaat bagi kedua negara, seperti peningkatan perdagangan, investasi, dan pariwisata.

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kerjasama G2G dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti peningkatan perdagangan, investasi, dan pembangunan.

- Meningkatkan perdamaian dan keamanan

Kerjasama G2G dapat membantu meningkatkan perdamaian dan keamanan di dunia. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kerjasama pemberantasan terorisme, penyelesaian migrasi ilegal, anti-narkotika, dan anti-penyelundupan barang dan manusia.

## REFERENSI

- Alsubaie, T. A. Ei. (2019). The Role of Negotiations in International Relations. *Journal of Economic, Administrative and Legal Science*, 3(5).
- Berridge, G. R. (2022). *Diplomacy: Theory and Practice* (6th ed.). Springer Nature.
- Berridge, G. R., & Lloyd, L. (2012). *The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Bottery, M. (2003). Globalization and the educational policy context. In Davies, B & Burnham, J.W. (Eds.), *Handbook of Educational Leadership and Management* (pp.155-164). London: Pearson, Longman.
- Cheng, Y.C. (2003). Globalization, localization, and individualization of education for the future. In Davies, B & Burnham, J.W. (Eds.), *Handbook of Educational Leadership and Management* (pp.660- 670). London: Pearson, Longman.
- Coe, N. M., & Yeung, H. W. (2015). *Global Production Networks: Theorizing Economic Development in an Interconnected World*. Oxford University Press, USA.
- Cooper, A. F., Heine, J., & Thakur, R. (2013). *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford University Press.
- Diez, J. R., Breul, M., & Moneke, J. (2019). The SIJORI Growth Triangle. *Journal of Southeast Asian Economies*, 36(1), 71-90.
- Jeong, H. W. (2016). *International Negotiation: Process and Strategies*. Cambridge University Press.
- Kapoor, A. (1970). Negotiation Strategies in International Business-Government Relations: A Study in India. *Journal of International Business Studies*, 1(1), 21-42.
- Karim, M. F., Mursitama, T. N., Riyadi, S. F., Affandi, R. A., & Muzdalifa, F. (2023). Informality, Paradiplomacy, and Cross-Border Cooperation: The Development of Tourism on Bintan Island, Indonesia. *Asian Studies Review*, 1-19. <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2259080>
- Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. Routledge.



- Liu, T., & Song, Y. (2020). Chinese Paradiplomacy: A Theoretical Review. *SAGE Open*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.1177/2158244019899048>
- Marks, G., Hooghe, L. and Blank, K. (1996). European integration from the 1980s: State-Centric v.
- Piattoni, S. (2009). Tata kelola multi-level: analisis historis dan konseptual..*Jurnal Integrasi Eropa*,31(2), 163–180.  
<https://doi.org/10.1080/07036330802642755>
- Pietrasiak, M., Bywalec, G., Kamiński, T., Mierzejewski, D., & Słowikowski, M. (2018). *Paradiplomacy in Asia: Case Studies of China, India and Russia*. Łódź University Press.
- Roger, F., Ury, W., & Patton, B. (1981). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguins Books.
- Schiavon, J. A. (2018). *Comparative Paradiplomacy*. Routledge.
- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. Oxford University Press.
- UNDP. 2020. Visual Guide to UNDP Programming Cycle. New York: UNDP.  
<https://popp.undp.org/document/visual-guides-programming-programme-cycle>
- Waters, M. (2000). *Globalization* (2nd ed.). Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9780203136478>
- World Bank. 2023. World Bank Project Cycle. Washington DC: World Bank.  
<https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/projectcycle>